Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 2 2026, hal 835-841
Avaliable online at : https://zia-research.com/index.php/abdicendekia/index

ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 835- 841
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia/index

Strategi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Berbasis *Good Governance* Pada Inspektorat Bondowoso

Diah Indriani[1], Dwi Amaliatul Firdauz[2], Yulistiawati[3], Nurul Setianingrum[4]
[1,2,3,4] UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
Email: diahindriani14@gmail.com[1], dwiamaliatul@gmail.com[2], tiayulis028@gmail.com[3], nurulsetia02@gmail.com[4]

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengawasan internal dalam mewujudkan *Good Governance* pada instansi pemerintah daerah, serta adanya kesenjangan antara sistem pengawasan yang telah dirancang dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengorganisasian dalam meningkatkan kinerja pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis dokumen. Data diperoleh dari dokumen resmi, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Tahun 2026, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, serta dokumen tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengorganisasian dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (POAC). Perencanaan berbasis risiko melalui PKPT, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan audit dan evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan mampu meningkatkan efektivitas dan ketepatan pengawasan.

Kata kunci: Pengorganisasian, Kinerja Pengawasan, Good Governance, Inspektorat, POAC.

Organizing Strategy To Improve Supervision Performance Based On Good Governance At The Bondowoso Inspectorate

Abstract

This study is motivated by the importance of internal supervision in realizing Good Governance in local government institutions, as well as the gap between formally established supervisory systems and their implementation in practice. This study aims to analyze organizational strategies in improving supervisory performance at the Inspectorate of Bondowoso Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach through document analysis. Data were obtained from official documents, including the Government Agency Performance Report (LKIP) 2025, Standard Operating Procedures (SOP) for Supervision 2026, Annual Supervision Work Program (PKPT) 2026, and the inspectorate's duties and functions documents. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that organizational strategies are implemented through four main stages: planing, organizing, actuating, and controlling (POAC). Risk-based planing through PKPT, clear task

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

division supported by SOP, implementation through audit and evaluation, and continuous monitoring have improved supervisory effectiveness and accuracy.

Keywords: *Organizing, Supervisory Performance, Good Governance, Inspectorate, POAC.*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang modern saat ini, tuntutan masyarakat terhadap terciptanya pemerintah yang bersih, akuntabel, dan transparan semakin meningkat. Pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif serta terhindar dari berbagai praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan serta tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan internal pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Prinsip *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Segah, 2020). Dalam konteks ini, pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi sektor publik.

Dalam pemerintahan daerah, Inspektorat memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan pengawasan sangat dipengaruhi oleh strategi pengorganisasian yang diterapkan, karena pengorganisasian menentukan pembagian tugas, alur koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan (Lovihan et al., 2018). Hal ini sejalan dengan konsep perilaku organisasi yang menyatakan bahwa struktur organisasi dan koordinasi kerja sangat menentukan efektivitas kinerja organisasi.

Dengan demikian, pengawasan tidak dapat dilepaskan dari fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan pola kerja yang terarah, memperjelas tanggung jawab antarindividu, serta memperkuat koordinasi antarbagian sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Sebaliknya, lemahnya sistem pengorganisasian dapat menimbulkan tumpang tindih tugas, kurangnya koordinasi, serta rendahnya efektivitas pengawasan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola pemerintah daerah (Runtu et al., 2025).

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bondowoso tahun 2025, pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah. Hal ini ditunjukkan melalui capaian indikator kinerja, seperti tercapainya target maturitas SPIP serta meningkatnya nilai SAKIP. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum tercapai secara optimal, seperti implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia aparatur pengawasan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara optimal. Hal ini sejalan dengan kajian perilaku organisasi yang menekankan pentingnya faktor individu dan kelompok dalam menentukan kinerja organisasi (Palawana et al., 2025).

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang sistematis, Inspektorat Kabupaten Bondowoso telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja serta menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pengawasan karena mampu memfokuskan sumber daya pada area yang memiliki potensi penyimpangan lebih tinggi

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

(Wibowo, 2026). Selain itu, penerapan prinsip *good governance* juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal dan transparansi dalam organisasi.

Penelitian oleh Maharani dkk (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pengimplementasian *good governance* sangat dipengaruhi oleh adanya efektivitas dukungan sistem pengendalian internal, terutama melalui peran satuan pengawas internal, budaya organisasi, serta komitmen organisasi. Begitu juga, penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal melalui standar operasional prosedur (SOP) dapat meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Haryanto dkk (2022) bahwa sistem pengendalian internal dan prinsip *good corporate governance* secara bersama-sama memengaruhi kualitas tata kelola keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa strategi pengorganisasian yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pengawasan dan penerapan prinsip *good governance*. Struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal serta mendukung peningkatan akuntabilitas sektor publik secara keseluruhan. Namun demikian, penelitian mengenai strategi pengorganisasian pengawasan internal pada Inspektorat daerah masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji keterkaitan antara pengorganisasian, efektivitas pengawasan, dan penerapan prinsip *good governance* secara terpadu.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan, sementara kajian mengenai bagaimana strategi pengorganisasian dalam pelaksanaan pengawasan internal mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi strategi pengorganisasian pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengorganisasian pengawasan internal yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam mendukung penerapan prinsip *good governance*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena strategi pengorganisasian dalam meningkatkan kinerja pengawasan berbasis *good governance* pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi, proses, serta implementasi pengawasan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Ranna, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada analisis dokumen (*document analysis*), yaitu dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan internal pemerintah. Analisis dokumen dipilih karena mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan, prosedur, serta capaian kinerja organisasi secara objektif dan sistematis.

Dokumen yang dianalisis meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Tahun 2026, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, serta dokumen tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Inspektorat. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data utama dalam mengidentifikasi strategi pengorganisasian serta efektivitas pelaksanaan pengawasan internal pemerintah. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, serta menginterpretasikan data untuk memperoleh temuan terkait strategi pengorganisasian dalam meningkatkan kinerja pengawasan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

berbasis *good governance*. Penggunaan analisis dokumen dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dokumen organisasi, seperti SOP dan laporan kinerja, merupakan sumber data yang valid dalam mengevaluasi implementasi tata kelola dan pengendalian internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami mekanisme, prosedur, serta implementasi pengawasan yang diterapkan oleh instansi dalam menjalankan fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Pengorganisasian pengawasan ditunjukkan melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas dalam struktur organisasi serta didukung oleh SOP sebagai pedoman operasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengorganisasian memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan. Secara ilmiah, kondisi ini terjadi karena struktur organisasi yang jelas mampu meningkatkan koordinasi kerja, mengurangi tumpang tindih tugas, serta memperjelas tanggung jawab masing-masing unit kerja. Hal ini sejalan dengan teori perilaku organisasi yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang efektif akan meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja organisasi (Budiman, 2026). Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan koordinasi, efektivitas kerja, serta kinerja organisasi publik. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kejelasan struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan internal pemerintah serta peningkatan akuntabilitas sektor publik (Sovia Faturahman et al., 2026).

Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan PKPT dengan pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prioritas pengawasan ditentukan berdasarkan tingkat risiko pada objek pemeriksaan sehingga kegiatan pengawasan menjadi lebih terarah dan efisien. Secara konseptual, pendekatan ini sesuai dengan prinsip *Risk-Based Auditing* yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan pengawasan berbasis risiko mampu meningkatkan kualitas hasil audit serta mendukung penerapan *Good Governance* dalam sektor publik.

Pada tahap pengendalian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bondowoso melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Data dalam dokumen LKIP menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian telah berjalan secara efektif. Secara ilmiah, kondisi ini terjadi karena adanya mekanisme *monitoring* yang berkelanjutan serta komitmen organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam optimalisasi pengendalian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan efektivitas pengawasan, sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen sumber daya manusia yang menyatakan bahwa kompetensi dan jumlah SDM sangat memengaruhi kinerja organisasi.

Pada tahap evaluasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, seperti peningkatan nilai SAKIP dan maturitas SPIP. Namun demikian, implementasi Zona Integritas belum menunjukkan hasil yang optimal. Secara ilmiah, kondisi ini terjadi karena keberhasilan implementasi Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan komitmen individu dalam

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

menerapkan nilai integritas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nikmatul Masruroh yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal harus didukung oleh internalisasi nilai-nilai organisasi agar tata kelola dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, penelitian lain juga menyatakan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi dan integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jika dianalisis menggunakan pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dari George R. Terry, maka terlihat bahwa pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso telah mencerminkan integrasi fungsi manajemen. Pada tahap *planning*, kegiatan pengawasan direncanakan melalui PKPT berbasis risiko. Pada tahap *organizing*, dilakukan pembagian tugas melalui struktur organisasi dan SOP. Pada tahap *actuating*, pengawasan dilaksanakan melalui audit, reviu, dan evaluasi. Sementara itu, pada tahap *controlling*, dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja melalui LKIP.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengorganisasian dalam meningkatkan kinerja pengawasan berbasis *good governance* terbentuk melalui keterpaduan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya implementasi budaya integritas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem yang telah dirancang secara formal dengan implementasi di lapangan, yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal.

Selain aspek struktur organisasi dan pengawasan berbasis risiko, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarbagian dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Bondowoso memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengawasan internal. Koordinasi yang terjalin antara auditor, pejabat pengawas, serta pimpinan organisasi memungkinkan proses pengawasan berjalan lebih terarah dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan. Secara teoritis, koordinasi organisasi merupakan bagian penting dalam fungsi pengorganisasian karena mampu menciptakan sinkronisasi kerja antarunit sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif (Satya Pratama et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur formal organisasi, tetapi juga oleh kualitas hubungan kerja dan komunikasi antarpegawai.

Di sisi lain, hasil analisis dokumen juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso telah tercermin melalui upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan. Hal ini terlihat dari adanya penyusunan laporan kinerja secara berkala, penggunaan indikator capaian kinerja, serta pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Secara ilmiah, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintah karena proses pengawasan dilakukan secara terbuka dan terukur. Temuan ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi pengawasan masih menghadapi tantangan dalam aspek pengembangan kompetensi aparatur pengawasan. Keterbatasan jumlah auditor dan beban kerja yang cukup tinggi berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan audit dan evaluasi. Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam menentukan keberhasilan pengawasan internal pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi auditor menjadi kebutuhan penting guna memperkuat profesionalisme APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan.

SIMPULAN

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengorganisasian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pengawasan berbasis *Good Governance* pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan prosedur formal, tetapi juga oleh keterpaduan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan berbasis risiko, kejelasan struktur organisasi, konsistensi pelaksanaan, serta pengendalian yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini sekaligus menjawab permasalahan penelitian bahwa meskipun sistem pengawasan telah dirancang secara sistematis melalui SOP, LKIP, dan PKPT, efektivitasnya masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia serta belum kuatnya internalisasi nilai integritas dalam organisasi.

Selain itu, penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko yang didukung oleh pengorganisasian yang terstruktur terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran pengawasan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Namun demikian, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kapasitas aparatur serta komitmen organisasi dalam membangun budaya integritas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja pengawasan tidak cukup hanya melalui perbaikan sistem formal, tetapi juga memerlukan penguatan aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait integrasi antara fungsi manajemen, pengawasan berbasis risiko, dan penerapan prinsip good governance dalam organisasi pemerintah. Ke depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran faktor perilaku organisasi dan kepemimpinan dalam mendukung efektivitas pengawasan internal pemerintah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pengorganisasian pengawasan internal tidak hanya bergantung pada aspek administratif dan prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi kerja, komunikasi organisasi, serta budaya kerja yang mendukung integritas dan profesionalisme aparatur. Dengan demikian, implementasi *good governance* dalam pengawasan internal memerlukan sinergi antara sistem pengendalian formal dan penguatan aspek perilaku organisasi secara berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode yang lebih variatif, seperti wawancara mendalam atau observasi lapangan secara langsung, sehingga dapat diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengawasan internal pemerintah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan transformasi digital terhadap efektivitas pengawasan berbasis good governance pada instansi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman. (2026). PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK MELALUI PEMBARUAN STRUKTUR ORGANISASI. *EFISIENSI: Kajian Ilmu Administrasi*, *6*(Efisiensi).

Haryanto, Y. B., Masud, M., & Dm, R. (2022). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH PADA WILAYAH PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Nobel Management Review*, *3*. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/NMaR

Lovihan, L. J., Tewal, B., & Taroreh, R. N. (2018). ANALISIS KOORDINASI DAN PENGAWASAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA KARYAWAN PT. BERKAT NIKITA WAYA LANSOT DI MINAHASA UTARA. In *Analisis Koordinasi… 2378 Jurnal EMBA* (Vol. 6, Number 4).

Maharani, R., BZ, F. S., & Priantana, R. D. (2023). Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(3), 555–566. https://doi.org/10.33059/jseb.v14i3.5311

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Masruroh, N. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, *4*(3), 467–476. https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.281

Palawana, J., Dzaki Nur Irvan, M., Taufik, M., Putri Hamyullah, R., Lailatul Rachma, S., & Devi Maulana, S. (2025). Pengaruh Perilaku Organisasi terhadap Kinerja dan Pengelolaan SDM. *Indonesia Economic Journal*, *1*, 1514–1519. https://doi.org/10.63822/745d4p13

Ranna, S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *8*.

Runtu, V. A., Mustafa, D., & Juharni, J. (2025). Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Studi Kasus Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Paradigma Journal of Administration*, *3*(2), 118–121. https://doi.org/10.35965/pja.v3i2.7650

Satya Pratama, R., Irvan, M., & Aguswan. (2025). *Analisis Koordinasi Pegawai Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Utara* (Vol. 11).

Segah, B. (2020). PERANAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Restorica*, *6*, 91–97. https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2

Sovia Faturahman, G., Rumijati, A., & Yuliati, U. (2026). *ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI DAN IMPLEMENTASINYA PADA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (STUDI KASUS INSPEKTORAT KABUPATEN PROBOLINGGO)* (Vol. 20).

Wibowo, A. (2026). IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT KOTA METRO. In *Jurnal Dinamika Pemerintahan* (Vol. 9, Number 1).

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923